
PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKSESIBILITAS DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA LAWANG URU KECAMATAN BANAMA TINGANG KABUPATEN PULANG PISAU

Lala Silvia¹, Sri Yuni², Oktobria Y. Asi³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Article Info

Article history:

Received December 5th, 2022

Revised December 20th, 2022

Accepted January 12th, 2023

Keywords:

Accountability report presentation, accessibility, and internal control systems and accountability

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the accountability report presentation, accessibility and system control systems on the accountability of Village Fund Allocation (ADD) management in Lawang Uru Village, Banama Tingang District, Pulang Pisau Regency. The research method used is quantitative research methods. The population in this study were all RT, BPD, Village Heads and Lawang Uru community, Banama Tingang District, Pulang Pisau Regency as many as 17 respondents. Respondents in this study consisted of RT, BPD, Kaur, secretary and the Head of Lawang uru village, banama tingang district, home knife district as many as 17 respondents. The dependent variable of this study is accountability (Y). The independent variables include: accountability report presentation (X1) accessibility (X2) internal control system (X3) and accessibility accountability report presentation and internal control system (X4). For the data analysis method using multiple linear regression. The results of this study indicate that the accountability report presentation, accessibility, has a significant positive effect on the accountability of Village Fund Allocation (ADD) management in Lawang Uru Village, Banama Tingang District, Pulang Pisau Regency. whereas the internal control system and the effect of the accountability report presentation, accessibility and internal control system did not have a significant positive effect on the accountability of the Village Fund Allocation (ADD) management in Lawang Uru Village, Banama Tingang District, Pulang Pisau Regency. The variable that has the highest t-count value is the variable in the accountability report presentation. This means that accountability is driven more by the presentation of accountability reports.

©2023

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Corresponding Author:

Sri Yuni

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Kampus UPR Jalan H. Timang Palangka Raya

Kalimantan Tengah

E-mail: sri.yuni@feb.upr.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perhatian terhadap desa di Indonesia meningkat dalam akhir tahun ini. Hal ini terjadi karena adanya penetapan peraturan pemerintah UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya

guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan desa tidak terlepas dari akuntabilitas. Secara umum akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sangat penting karena merupakan salah satu bentuk media pertanggungjawaban pemerintah desa sebagai entitas yang mengelola dana desa. BPKP (2015: 1) menyatakan bahwa dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa kurang lebih sebesar Rp 20,776 triliun kepada 74.093 desa yang tersebar di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 Pasal 29, formula pembagian dihitung berdasarkan jumlah desa, dengan bobot sebesar 90% dan hanya 10% yang dihitung dengan menggunakan formula jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografi. Pemerintah lebih menekankan pada asas pemerataan, dimana setiap desa memiliki jumlah dana desa yang relatif sama. Tiap desa minimal menikmati dana desa sebesar Rp252,2 juta, apapun besaran/kebutuhan desa tersebut. Kebijakan ini memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Secara umum, akuntabilitas diartikan sebagai sebuah bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik (Mustofa, 2012).

Permendagri 113 Tahun 2014 menjelaskan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ada pula asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

1. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
2. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Suatu organisasi sektor publik dalam mengelola dana masyarakat dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala Desa menjadi penanggungjawab pengelolaan keuangan dan aset desa. PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 menyatakan tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa diwajibkan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa juga diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui camat. Pertanggungjawaban yang tinggi dalam penyajian laporan keuangan akan memicu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas yang efektif dapat terwujud apabila informasi yang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2009). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007). Menurut UU No. 6 Tahun 2014 pasal 86 menyatakan

bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sistem informasi desa yang dimaksud yaitu fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, serta jaringan yang berisi informasi berkaitan dengan pembangunan desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Aksesibilitas dapat diartikan sebagai sarana pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik secara terbuka dan jujur berupa laporan keuangan yang dapat di akses dengan mudah oleh berbagai pihak yang berkepentingan (Mustofa, 2012).

Permendagri 113 Pasal 40 menyatakan laporan realisasi dan laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APB Desa wajib di informasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat media informasi sebagaimana dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. Dialokasikan dana desa kurang sslebih sebesar Rp 20,776 triliun ke seluruh desa di Indonesia, pemerintah kabupaten/kota berperan mengawasi pengelolaan dana tersebut. Masih rendahnya sumber daya manusia di desa secara langsung akan mempengaruhi tingkat transparansi dan akuntabilitas. Hal tersebut akan memicu terjadinya kecurangan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Salah satu upaya mencegah terjadinya kecurangan yang merupakan unsur utama perbuatan korupsi ini adalah dengan meningkatkan dan membangun pengendalian intern yang baik dan menyeluruh (Ramon, 2014).

Pengendalian internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan guna pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Menurut Krismiaji, (2010: 218) menyebutkan bahwa pengendalian internal adalah rancana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Peran pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa dengan menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pemerintah desa menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan stewardship theory yaitu tugas pemerintah menyajikan laporan keuangan, memberikan aksesibilitas laporan keuangan dan system pengendalian internal merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat desa. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ema Tietien Chrystiana. (2017). Perbedaan dari penelitian ini adalah menggunakan dua variabel dependen yaitu Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Peneliti menggunakan objek yang berbedaya yaitu Pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang pisau. Pemerintah Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang pisau merupakan salah satu entitas pelaporan yang memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, dalam penyajiannya masih mengalami berbagai kendala dan masalah. Permasalahan tersebut seperti, masyarakat Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang pisau tidak mengetahui akan pentingnya akuntabilitas keuangan desa. Masyarakat tidak mengetahui bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana kebutuhan dana tersebut dibelanjakan karena tidak diungkapkan secara terbuka kepada publik. Sebagai masyarakat yang membayar pajak, tentunya masyarakat juga ingin mengetahui bagaimana dan digunakan untuk apa saja dana yang dipercayakan kepada pemerintah (Wawancara, 15 febuari 2017). Saat ini, setiap pemerintah desa dituntut untuk memiliki website yang bertujuan untuk membuka informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat luas. Pemerintah Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang pisau sudah memiliki situs atau website yang menjadi penghubung komunikasi antara Pemerintah Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama

Tingang, Kabupaten Pulang pisau dengan masyarakat luas, akan tetapi belum memuat mengenai laporan keuangan sehingga masyarakat tidak mengetahui realisasi dana desa (Wawancara, 15 febuari 2017). Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari akuntabilitas keuangan daerah (Wawancara, 15 febuari 2017). Kurangnya diperlakukan sistem pengendalian internal pemerintah desa agar bisa memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efeksiensi tercapain tujuan penyelenggaraan pemerintah desa, kendala pelaporan keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Wawancara, 15 febuari 2017).

Selanjutnya, peneliti ingin mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa lawang uru , Kecamatan banama tingang, Kabupaten pulang pisau seperti penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Wahida N, 2015).

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri no. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri No. 37/2007) dalam Pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (Setiawan 2017: 3).

Alokasi Dana Desa

Salah satu bentuk bantuan langsung dari pemerintah pusat adalah Alokasi Dana Desa (ADD), Alokasi Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa.

Akuntabilitas

Menurut Mustofa (2012: 2), akuntabilitas merupakan sebuah bentuk dari kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sebuah keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai sasaran atau target yang telah diterapkan untuk periode-periode sebelumnya yang dilakukan secara periodik. Akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi (Widodo, 2011: 67).

Akuntabilitas (accountability) merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Hal ini karena stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas (accountability) mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang steward kepada pemberi tanggung jawab. (Mardiasmo, 2002: 21).

Penyajian Laporan Pertanggungjawaban

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan faktor penting untuk menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010: 51).

Aksesibilitas

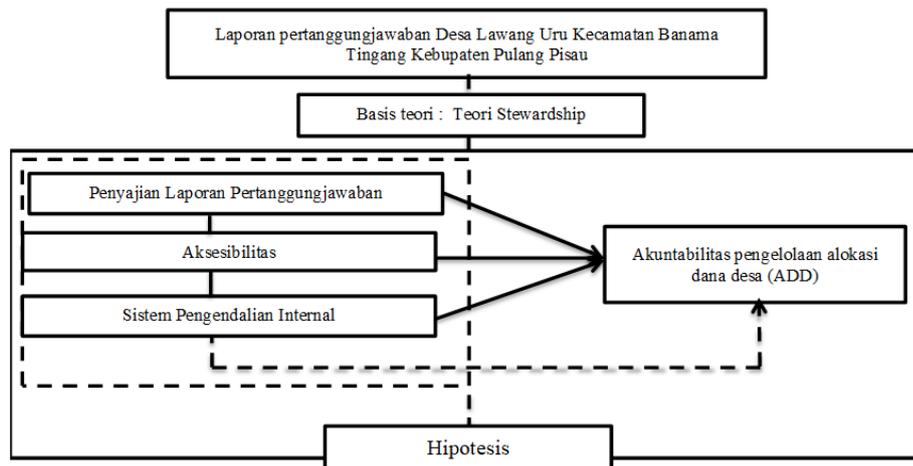
Aksesibilitas laporan keuangan adalah sarana penunjang dalam rangka perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga akan memberikan pengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah (Apriliani 2015: 3). Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemampuan dalam memberikan akses bagi stakeholder untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi stakeholder (Aliyah 2012: 142). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal dapat dikaitkan. Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah (Sukhemi, 2012).

Sistem pengendalian internal

Sistem pengendalian intern pemerintah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah ialah proses yang internal pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kerangka Berfikir Penelitian

Menurut Uma Sekaran Kerangka berfikir dapat diartikan sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang akan akan dibentuk dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar :



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Sumber : peneliti sendiri

Pengembangan Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh Penyajian Pertanggungjawaban Terhadap Akuntabilitas

Mustofa (2012), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan hipotesis sebagai berikut:

H1: penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang pisau.

2. Pengaruh Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas

Sukhemi (2012), menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis dapat disimpulkan sebagai berikut:

H2: aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas

Penelitian Ramon (2014) menguji pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat dengan hasil analisisnya menunjukkan system pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau.

4. Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas

H4: Penyajian Laporan Pertanggungjawaban, Aksesibilitas, dan Sistem Pengendalian Internal Berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau.

3. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:8) mengatakan bahwa: "Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Kelayakan Model

Uji kelayakan model dalam penelitian ini menggunakan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat (Ghozali, 2011: 98).

Tabel 1 Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji F) Variabel Dependen Akuntabilitas
ANOVA^a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	190.960	3	63.653	121.607	.000 ^b
	Residual	6.805	13	.523		
	Total	197.765	16			

Hasil uji F dengan variabel dependen akuntabilitas dapat dilihat dari nilai F pada tabel ANOVA yaitu diperoleh sebesar 121,507 dan sig. 0,000. Hasil ini lebih besar jika dibandingkan dengan $F_{(3; 14)}$ diperoleh nilai $F_{(3; 14)} = 3,47$.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variasi variabel independen (Widarjono, 2013:70). Tetapi penggunaan koefisien determinasi tersebut memiliki suatu kelemahan, yaitu terdapatnya suatu bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Agar terhindar dari bias tersebut, maka digunakan nilai adjusted R^2 , dimana nilai adjusted R^2 mampu naik atau turun apabila terjadi penambahan satu variabel independen (Ghozali, 2011:87).

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien determinasi (R^2) Variabel Dependen Akuntabilitas

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.983 ^a	.966	.958	.723

a. Predictors: (Constant), system pengendalian internal, aksesibilitas, penyajian laporan pertanggungjawaban

Hasil perhitungan untuk nilai R Square (R^2) dengan variabel dependen akuntabilitas, diperoleh angka koefisien determinasi $R^2 = 0,966$ atau 96,6%. Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari variabel penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal dalam menjelaskan variabel dependen yaitu akuntabilitas sebesar 96,6 %, sisanya ($100\% - 96,6\% = 3,6\%$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar model yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2011: 95). Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh yang ditimbulkan antara pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara bersama-sama dengan menggunakan persamaan regresi berganda sebagai berikut :

Table 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Dependen Akuntabilitas

Model	Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-3.272	1.965		-1.665	.120
	Penyajian laporan prtanggungjawaban	.516	.180	.681	2.876	.013
	Aksesibilitas	.442	.218	.282	2.027	.064
	Sistem pengendalian internal	.070	.350	.037	.201	.844

a. *Dependent Variable* : akuntabilitas

Berdasarkan tabel 4.19 di atas persamaan regresi linear berganda dapat disusun sebagai berikut: $Y = -3.272$ penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal + $0,516$ penyajian laporan pertanggungjawaban + $0,442$ aksesibilitas + $0,070$ sistem pengendalian internal + e. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Konstanta bernilai tidak positif sebesar -3.272 hal ini menunjukkan bahwa apabila variabel penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal jika dianggap konstan (0), maka nilai akuntabilitas sebesar -3.272
2. Koefisien regresi variabel penyajian laporan pertanggungjawaban (b1) bernilai positif sebesar 0,516. Hal ini berarti bahwa jika penyajian laporan pertanggungjawaban ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel aksesibilitas dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas sebesar 0,516.
3. Koefisien regresi variabel aksesibilitas (b2) bernilai positif sebesar 0,442. Hal ini berarti bahwa jika aksesibilitas ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas sebesar 0,422
4. Koefisien regresi variabel sistem pengendalian internal (b3) bernilai positif sebesar 0,070. Hal ini berarti bahwa jika aksesibilitas ditingkatkan satu satuan dengan catatan variabel penyajian laporan pertanggungjawaban dianggap konstan, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas sebesar 0,070.

Uji Signifikansi (Uji t)

Uji statistik *t* pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2011: 98). Hasil uji *t* dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Uji t

Variabel	Thitung	Sig.	Kesimpulan
Dependen: akuntabilitas			
Penyajian laporan pertanggungjawaban	2.876	.013	Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.
Aksesibilitas	2.027	.064	Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.
Sistem pengendalian internal	.201	.844	Sistem Pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. terakuntabiliakuntabilitas.pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.
Penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal	- 1.665	.120	Penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang. Kabupaten Pulang Pisau.

Berdasarkan tabel 4. di atas diketahui bahwa pada variabel penyajian laporan pertanggungjawaban diperoleh nilai = 2,876 dan probabilitas sebesar 0,013, jika dibandingkan dengan (2,145) maka $t > t_{table}$ dan $p > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan

Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau

Variabel aksesibilitas diperoleh nilai = 2.027 dan probabilitas sebesar 0,064, jika dibandingkan dengan (2,145) maka $t < t_{table}$ dan $p > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H2 diterima, artinya aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau.

Variabel sistem pengendalian internal diperoleh nilai = 0.201 dan probabilitas sebesar 0,844, jika dibandingkan dengan (2,145) maka $t < t_{table}$ dan $p > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H3 tidak diterima, artinya sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau.

Variabel Penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal diperoleh nilai = -1.665 dan probabilitas sebesar 0,120, jika dibandingkan dengan (2,145) maka $t > t_{table}$ dan $p > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H4 diterima, artinya aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau.

Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.akuntabilitas dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Bastian, 2010). Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t penyajian laporan pertanggung jawaban diperoleh nilai thitung= 2,876 dan probabilitas sebesar 0,013, jika dibandingkan dengan tabel (2,145) maka thitung > tabel dan $p > 0,05$. Penyajian laporan pertanggungjawaban yang terbuka kepada publik akan menjadi alat ukur kinerja manajemen di pemerintah Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Semakin baik penyajian laporan pertanggungjawaban serta semakin sesuai dengan PP maka akan meningkatkan transparansi laporan keuangan karena akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi alat ukur kinerja pemerintah Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Apabila penyajian laporan pertanggungjawaban semakin baik maka transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau semakin meningkat. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Aliyah dan Mustofa (2012), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas.
2. Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai 2.027 di mana nilai signifikansinya $0,064 > 0,05$.

Apalah artinya menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal. Semakin baik tingkat aksesibilitas yang diberikan oleh Pemerintah Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau maka semakin baik pula tingkat transparansi laporan keuangan Pemerintah Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.

Apabila aksesibilitas semakin baik maka akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau semakin meningkat. Penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Mustofa (2012), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan secara positif terhadap akuntabilitas.

3. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.

Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingan Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai $t_{hitung} = 0.201$ dan probabilitas sebesar $0,844$, jika dibandingkan dengan $t_{tabel} (2,145)$ maka $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan $\rho > 0,05$. hal tersebut menunjukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingan Kabupaten Pulang Pisau. Dikarenakan nilai $t_{hitung} < 2,14$. Selain itu, sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang adalah tidak positif karna nilai parameter koefisien bernilai tidak positif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingan Kabupaten Pulang Pisau. pengujian variabel sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingan Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa tidak baik sistem pengendalian internal maka tidak akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingan Kabupaten Pulang Pisau.

Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dalam terciptanya akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingan Kabupaten Pulang Pisau yaitu dengan tidak adanya kontrol dari pemerintah maka kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang akan dilakukan pemerintah desa akan tidak terawasi serta dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Hasil penelitian yang dilakukan Armide (2014) menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah di Nigeria menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

4. Penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.

Penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di

Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini dinyatakan berdasarkan hasil uji t Penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai $t = -1.665$ dan probabilitas sebesar $0,120$, jika dibandingkan dengan $(2,145)$ maka $t > t_{table}$ dan $\rho > 0,05$. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Dikarenakan nilai $t < 2,145$. Selain itu, Penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau adalah tidak positif karena nilai parameter koefisien bernilai tidak positif.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Pengujian variabel sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau menunjukkan bahwa tidak baik sistem pengendalian internal maka tidak akan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh dalam terciptanya akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau yaitu dengan tidak adanya kontrol dari pemerintah maka kegiatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) yang akan dilakukan pemerintah desa akan tidak terawasi serta dapat meminimalisir adanya kecurangan dalam pengelolaan alokasi dana desa (ADD). Hasil penelitian yang dilakukan Armide (2014) menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas keuangan pada pemerintah daerah di Nigeria menunjukkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau. Penelitian ini menggunakan data primer yang didapat dari hasil kuisioner yang telah disebarakan berjumlah 17 responden. Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah SPSS Statistics 21. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.
2. Aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau
3. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.

4. Penyajian laporan pertanggungjawaban Aksesibilitas dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.

Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran yang penulis ajukan kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau harus memperhatikan penyajian laporan pertanggungjawaban aksesibilitas dan sistem pengendalian internal untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.
2. Penyajian laporan pertanggungjawaban perlu mendapatkan perhatian yang lebih karena variabel ini memiliki nilai yang paling besar dalam mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Lawang Uru Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau.
3. Penelitian kedepan diharapkan dapat melakukan penambahan jumlah variabel penelitian, meneliti pada variabel penelitian yang berbeda, dan subjek yang lain.

REFERENCE

- Aliyah, S. Dan Nahar, A. (2012). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara*. Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8/No. 2/Mei 2012: 97-189
- Annisaningrum. (2010). *Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Laporan Keuangan*.
- Apriliyani, N.K.A., et al. (2015). Pengaruh penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif, dan aksesibilitas terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Klungkung). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurusan Akuntansi Program S1. (Volume 3 No 1 Tahun 2015)*.
- Astuty, E Dan Fanida, E.H. (2013). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun)*. Jurnal Ekonomi.
- Auditya, L et al. (2013). *Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah*. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 2013: 21- 41 ISSN 2303-0348.
- Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah*.
- Ema Tietien Chrystiana (2017). *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo*. Jurnal Jurusan Akuntansi Syariah ,Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Fajri, R., & Et, Al. (2015). *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 3,No. 7, Hal. 1099-1104 .
- Ghozali, I.(2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan menggunakan program IBM SPSS 19*. Badan Penerbitan: Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*.Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

- Hanifah, S. I., & Praptoyo, S. (2015). *Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 8 (2015), 2
- Hariawan bihamding (2019). *Penelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta. Deepublish.
- Krismiaji, 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Tiga. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* : Volume 5, Nomor 11, November 2016
- Lapananda, Y. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*. Buku I. Jakarta: Rmbooks/.
- Lewier, C.N. Dan Kurniawan, C.H. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten*. *Jurnal Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Mamuaya, J. V. Et Al. (2017). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desaberdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. *Jurnal Embavol.5 No.2 Juni 2017*, Hal. 1020 – 1030
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Empat. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2006. *Perwujudan Tranparansi Dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran Good Governace*. *Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Nekonomi, Universitas Negeri Semarang*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi
- Mores, J.M. (1991). Subject, Serpondents Informasi, and Participants? *Qualitative Healthn Research*, 1(4), 403-406
- Muslimin, & Et Al. (2012). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatanbang kala Kabupaten Jeneponto*. Otoritas Vol. II No. 1 April 2012, 83.
- Mustofa, A.I. (2012). *Pengaruh Penyajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang*. *Accounting Analysis Journal*.
- Nur Leila Yuliana (2016). *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Magelang)*. *Jurnal Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang*.
- Noor, J. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Utama).
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurcholis, H (2010). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip).
- Ramon, Dolly. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Keuangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Kota Se Provinsi Sumatera Barat)*. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta*.
- Sekaran, Uma. (2006). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro
- Setiawan, M. W., Dan Et Al. (2017). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu, Kab. Buleleng)*. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3
- Solekhan, M. (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sanusi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. (2017). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukhemi. (2012). *Pengaruh Aksesibilitas Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah*. *Akmenika Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*.

- Sujarweni, v.wiratna, 2015, *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan desa terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Sujarweni, V. Wiratna.2015. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Prees
- Wahida, N. (2015). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Utar*. Skripsi Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Widyatama, Arif. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa(ADD). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Wardana, I. (2016). *Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Magelang)*. Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2016.
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika, pengantar dan aplikasinya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.